



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

A

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ab

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non PNS atau tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun golongan yang diperlukan untuk memperoleh pengeluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

As

14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk *boarding pass* dan *airport tax*), bis dan taksi (dari Kabupaten ke Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya) sesuai biaya riil (*at cost*).
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Biaya uang harian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
25. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon I/Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah.
26. Uang transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya transport pulang pergi, transport bandara serta retribusi yang dipungut dalam melakukan perjalanan dinas.
27. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menugaskan dan atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas.
28. Estimasi adalah perkiraan, penilaian atau pendapat.
29. Rapid Test adalah metode pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi.
30. Pcr/Swab Test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi virus corona.

BAB II

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Dasar Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perjalanan dinas untuk kelancaran proses kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (3) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD.

- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Pejabat yang berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas yang berkenaan antara lain Surat, Telegram/kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, ketentuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (6) Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (7) Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - c. untuk PNS dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu :

1. bagi Pejabat Eselon II SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Mewakili Sekretaris Daerah atas persetujuan dan koordinasi dengan Bupati atau Wakil Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon III SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
 3. bagi Pejabat Eselon IV, staf dan pegawai tidak tetap SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili;
 4. untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang mewakili;
- d. untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
1. bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pejabat lainnya beserta staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT); atau
 2. apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
- e. untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada Kecamatan :
1. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat setempat;
 2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani Camat pada unit kerja yang bersangkutan; dan

3. bagi Pejabat Eselon III/b dan staf yang berada di masing-masing Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Camat.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan terlebih dahulu harus membuat pengajuan berupa Nota Dinas ke pejabat yang berwenang memberi tugas dan memperoleh persetujuan secara berjenjang.
- (5) Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi, penyampaian data/laporan yang memerlukan penjelasan langsung dibatasi maksimal 2 (dua) orang,

Pasal 4

- (1) SKPD dapat menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Keikutsertaan Calon PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kota ke Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari, dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkiraan lamanya waktu perjalanan dan dapat diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi serta uang penginapan.

- (3) Pemberian uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan uang penginapan disesuaikan dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk kegiatan survey lapangan, pemetaan, ujitera, penelitian dan pemeriksaan reguler bagi Aparat Pengawasan Fungsional serta untuk pengawasan umum, maka perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan jadwal lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota (ke Kecamatan) dalam rangka kegiatan Reses atau kegiatan lainnya yang tujuan perjalanan dinasnya bukan hanya ke ibu kota kecamatan, akan tetapi sampai ke desa dan dusun, dapat diberikan tambahan bantuan biaya transportasi.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota (ke Kecamatan) dalam rangka kegiatan survey lapangan dan pengawasan umum atau pengawasan terhadap pekerjaan dapat dilakukan penyesuaian uang harian.
- (4) Besaran bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyesuaian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Biasa ke Ibu Kota Negara/Kota lainnya di luar provinsi, diberikan waktu maksimal paling lama 4 (empat) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan

dinas serta uang transport ke Ibukota Negara/daerah lainnya di luar provinsi (pergi-pulang) serta biaya transport dari Putussibau ke Pontianak (pulang-pergi).

- (2) Perjalanan Dinas Biasa ke Ibu Kota Provinsi/Ibu kota lainnya dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat diberikan waktu maksimal paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta tambahan biaya transport dari Putussibau ke Pontianak/Ibukota lainnya dalam wilayah Provinsi (pulang-pergi).
- (3) Perjalanan dinas dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan apabila jadwal kegiatannya melebihi batas maksimal perjalanan dinas, sehingga dapat diberikan tambahan uang harian perjalanan dinas dan penginapan.
- (4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi bukti berupa surat/telex dan jadwal kegiatan yang diikuti setelah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/a;
 - c. Pejabat Eselon II/b dan Staf Ahli Bupati;
 - d. Pejabat Eselon III dan Non Eselon Golongan IV;

- e. Pejabat Eselon IV, Non Eselon Golongan III, Fungsional Terampil, Fungsional Ahli dan Tenaga Honorar/Kontrak berpendidikan Sarjana.
 - f. PNS Golongan II dan Golongan I serta Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Yang dimaksud Fungsional Terampil dan Fungsional Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah pejabat fungsional yang telah lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
- a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport;
 - b. uang harian dan uang representasi;
 - c. biaya Penginapan; dan
 - d. ditambahkan biaya Rapid Test/Swab Test selama masa pandemi *COVID-19* yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Khusus untuk keperluan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah selain dibayarkan biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. biaya sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
 - b. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;

- b. biaya transportasi berupa tiket pesawat, bis dan taksi pulang pergi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - c. dalam keadaan mendesak terkait dengan ketersediaan sarana transportasi khususnya dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota provinsi atau ke Ibukota Kabupaten lainnya dalam Provinsi Kalimantan Barat, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan umum berupa taksi dalam bentuk carteran;
 - d. biaya taksi (transport bandara) diberikan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang menggunakan transportasi udara; dan
 - e. rincian biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf c, sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal harga tiket pesawat (termasuk *boarding pass*), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi) yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket pesawat (termasuk *boarding pass*), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi), maka Pejabat Negara/PNS/ CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat

tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/ melampirkan bukti pembatalan kegiatan.

- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/ melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (8) Perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah dan perjalanan Dinas Biasa/ke luar daerah dalam wilayah Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas/operasional dinas tidak diberikan biaya transportasi dan dapat diberikan bantuan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah ke Ibukota Kecamatan yang tidak memiliki akses sarana angkutan umum, maka biaya transportasi dapat dikonversikan menjadi biaya BBM.
- (10) Transport lanjutan untuk perjalanan dinas keluar Ibukota Kabupaten/Kota lainnya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan besarnya sesuai dengan tarif (biaya angkutan) yang dipergunakan.
- (11) Dalam hal biaya perjalanan dinas lanjutan keluar Ibukota Kabupaten/Kota lainnya tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat menggunakan surat pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (12) Biaya uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/pegawai tidak tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;

- b. selama melakukan perjalanan dinas pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) serta pejabat eselon II/Ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD dapat diberikan uang representasi per hari;
 - c. uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tempat keberadaan dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pemberian biaya penginapan bagi Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil tarif hotel atau tempat penginapan lainnya, yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran; dan
 - b. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (14) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket paket *Fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang : dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang : dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan

mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci sebagaimana Lampiran III tabel C dan D.

- (15) Bagi Pejabat/PNS/CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti kursus-kursus singkat dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dan/atau kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya, yang didalamnya terdapat biaya kepesertaan atau biaya kontribusi, untuk uang harian selama diklat dibayarkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran III huruf B kolom 4 sesuai dengan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sedangkan selisih lamanya perjalanan dengan lamanya kegiatan yang ditanggung panitia penyelenggara dibayarkan sebesar uang harian sesuai Lampiran III huruf A nomor urut 1, 2 dan 3.
- (16) Besaran biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti riil diperhitungkan dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Legalisasi SPT dan SPPD :

- a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, SPT dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah/Pejabat Departemen yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Halaman Belakang SPPD dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. untuk rincian perjalanan dinas sesuai dengan perhitungan SPPD rampung yang dibuat oleh Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. untuk pernyataan pengeluaran riil berdasarkan SPPD yang dibuat oleh Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. bagi Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas supaya menyampaikan laporan kegiatan yang diikutinya secara tertulis kepada Pimpinan serta menyerahkan SPT dan SPPD.

Pasal 12

Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyerahkan SPT atau SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding pass, tiket bis/taksi pulang pergi (PP), bukti biaya penginapan dan/atau surat pernyataan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

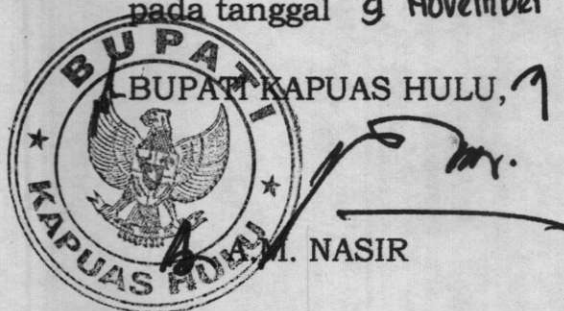
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 9 November 2020



Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

NOMOR 86.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NOMOR	URAIAN	BIAYA PEMETIAN (RUPIAH)	BIAYA PENGANGKUTAN
1	2	3	4
1	PEJABAT NEGARA	5.000.000,00	SESUAI DENGAN TRANSPORTASI YANG DIPERGUNAKAN
2	PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II/a	4.500.000,00	
3	PEJABAT ESELON II/b DAN STAF AHLI BUPATI	4.000.000,00	
4	PEJABAT ESELON III DAN NON ESELON GOLONGAN IV	3.500.000,00	
5	PEJABAT ESELON IV, NON ESELON GOLONGAN III, FUNGSIONAL TRAMPIL, FUNGSIONAL AHLI DAN TENAGA HONORER/KONTRAK BERPENDIDIKAN SARJANA	3.000.000,00	
6	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP	2.500.000,00	



[Handwritten Signature]
 NASIR

[Handwritten Mark]

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH

NOMOR	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	4
1	Bupati dan Wakil Bupati	Bisnis	Eksekutif
2	Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon II/a/ Eselon II/b/ Fungsional Golongan IV/d s/d Fungsional Golongan IV/e	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III (Golongan IV) / Fungsional Golongan IV/a s/d Fungsional Golongan IV/c	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon III (Golongan III)	Ekonomi	Eksekutif
5	Eselon IV (Golongan IV)	Ekonomi	Eksekutif
6	Eselon IV (Golongan III) / Fungsional Ahli Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
7	PNS Non Struktural Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
8	PNS Non Struktural Golongan III/Fungsional Terampil	Ekonomi	Eksekutif
9	Tenaga Honorer / Kontrak berpendidikan Sarjana.	Ekonomi	Eksekutif
10	PNS Non Struktural Golongan II/Tenaga Honorer/Kontrak berpendidikan Diploma dan SLTA.	Ekonomi	Eksekutif
11	PNS Non Struktural Golongan I	Ekonomi	Eksekutif

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NOMOR	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Pontianak	Jakarta	4.353.000,00	2.781.000,00
2	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
3	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
4	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
5	Pontianak	Timika	15.659.000,00	8.535.000,00
6	Pontianak	Batam	7.594.000,00	4.396.000,00
7	Pontianak	Yogyakarta	6.910.000,00	3.840.000,00
8	Pontianak	Banjarmasin	5.000.000,00	3.000.000,00
9	Pontianak	Palangkaraya	4.800.000,00	4.378.000,00
10	Pontianak	Bandung	-	3.000.000,00
11	Pontianak	Denpasar	7.990.000,00	4.738.000,00
12	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000,00	5.840.000,00
13	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000,00	3.220.000,00
14	Pontianak	Biak	15.873.000,00	8.568.000,00

1	2	3	4	5
15	Pontianak	Jambi	6.878.000,00	4.011.000,00
16	Pontianak	Jayapura	16.322.000,00	9.177.000,00
17	Pontianak	Manado	12.953.000,00	6.396.000,00
18	Pontianak	Mataram	8.001.000,00	4.706.000,00
19	Pontianak	Padang	8.193.000,00	4.460.000,00
20	Pontianak	Palembang	6.685.000,00	3.840.000,00
21	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000,00	3.733.000,00
22	Pontianak	Pekanbaru	8.247.000,00	4.514.000,00
23	Pontianak	Medan	9.733.000,00	5.230.000,00
24	Pontianak	Makasar	9.915.000,00	5.241.000,00
25	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
26	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
27	Jakarta	Banda Aceh	7.519.999,00	4.492.000,00
28	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
29	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
30	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
31	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
32	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
33	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
34	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
35	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
36	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
37	Jakarta	Jokjakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
38	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
39	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
40	Jakarta	Makasar	7.444.000,00	3.829.999,00
41	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
42	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
43	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
44	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
45	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
46	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
47	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
48	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
49	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
50	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
51	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00
52	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000,00	3.016.000,00
53	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
54	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
55	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
56	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
57	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00
58	Jakarta	Bandung	2.064.000,00	1.476.000,00

Catatan : Pelaksanaannya dilakukan secara At-Cost

C. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH (KE IBU KOTA PROVINSI/KABUPATEN LAINNYA)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA		TARIF PP (RUPIAH)	
	ASAL	TUJUAN	KENDARAAN DARAT	PESAWAT
1	2	3	4	5
1	Putussibau	Sintang	400.000,00	
2	Putussibau	Melawi	500.000,00	
3	Putussibau	Sekadau	550.000,00	
4	Putussibau	Sanggau	600.000,00	
5	Putussibau	Landak	650.000,00	
6	Putussibau	Pontianak	1.100.000,00	2.500.000,00
7	Putussibau	Kubu Raya	900.000,00	2.500.000,00
8	Putussibau	Mempawah	900.000,00	
9	Putussibau	Singkawang	900.000,00	
10	Putussibau	Bengkayang	1.100.000,00	
11	Putussibau	Sambas	1.200.000,00	
12	Putussibau	Ketapang	1.100.000,00	3.600.000,00
13	Putussibau	Kayong Utara	1.200.000,00	3.600.000,00

D. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (KE IBU KOTA KECAMATAN)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (RUPIAH)	KETERANGAN
		KENDARAAN UMUM	
1	2	4	5
1	Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.	350.000,00	Tarif maksimal

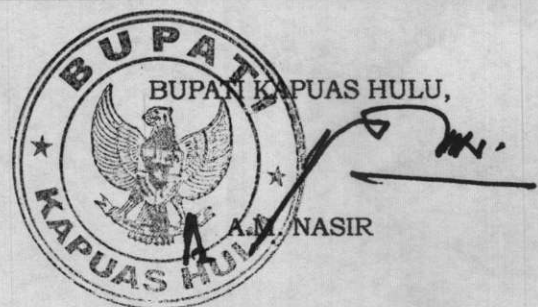
E. BIAYA TRANSPORT/ TAKSI BANDARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	BESARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KALIMANTAN BARAT :			1. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak/Kabupaten Kota lainnya menggunakan Pesawat PP, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 Point 1 huruf A dan huruf B.
	A. Putussibau	Orang/Kali	75.000,00	
	B. Pontianak/Kabupaten/ Kota lainnya	Orang/Kali	135.000,00	2. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan Pesawat PP dari Putussibau, mendapat uang transport bandara pada kolom 4 Point 1 huruf A dan huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.
2	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00	
3	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00	3. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan kendaraan darat PP dari Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 point 1 huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.
4	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00	
5	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00	4. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang memerlukan menginap di Pontianak yang menggunakan Pesawat PP Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 point 1 huruf A dan huruf B serta ditambah kolom 4 sesuai tempat tujuan.
6	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	
7	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00	5. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak atau ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang menggunakan kendaraan darat dari Putussibau- Pontianak dan menggunakan Pesawat Pontianak Putussibau atau sebaliknya, perhitungan uang transport bandara diberikan setengah dari nilai yang ada pada kolom 4.
8	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00	
9	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00	
10	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00	
11	BALI	Orang/Kali	159.000,00	
12	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00	
13	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	
14	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00	
15	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00	
16	SELAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00	
17	SELAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00	
18	SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00	
19	SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00	
20	SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00	
21	ACEH	Orang/Kali	123.000,00	
22	RIAU	Orang/Kali	94.000,00	
23	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00	
24	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	
25	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00	
26	BENGGKULU	Orang/Kali	109.000,00	
27	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00	
28	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00	
30	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00	
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00	

Catatan : Pelaksanaannya dilakukan secara Lumsum

F. BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN / UNIT

NOMOR	BERANGKAT	TUJUAN	KENDARAAN		KETERANGAN
			RODA 4 (RUPIAH)	SPEED BOAT (RUPIAH)	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	500.000,00	2.000.000,00	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	-	1.000.000,00	PP
3	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	1.000.000,00	4.500.000,00	PP
4	Putussibau	Kecamatan Badau	1.500.000,00	4.500.000,00	PP
5	Putussibau	Kecamatan Empanang	1.750.000,00	4.500.000,00	PP
6	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	2.000.000,00	-	PP
7	Putussibau	Kecamatan Kalis	300.000,00	-	PP
8	Putussibau	Kecamatan Mentebah	500.000,00	-	PP
9	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	750.000,00	-	PP
10	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	1.300.000,00	1.500.000,00	PP
11	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	750.000,00	-	PP
12	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	1.000.000,00	-	PP
13	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	1.000.000,00	-	PP
14	Putussibau	Kecamatan Seberuang	1.200.000,00	-	PP
15	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	2.000.000,00	4.000.000,00	PP
16	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	400.000,00	500.000,00	PP
17	Putussibau	Kecamatan Jongkong	1.500.000,00	2.000.000,00	PP
18	Putussibau	Kecamatan Selimbau	1.700.000,00	2.500.000,00	PP
19	Putussibau	Kecamatan Suhaid	1.500.000,00	3.000.000,00	PP
20	Putussibau	Kecamatan Semitau	1.300.000,00	3.000.000,00	PP
21	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	2.000.000,00	3.500.000,00	PP
22	Putussibau	Sintang	2.000.000,00	5.000.000,00	PP
23	Putussibau	Melawi	2.200.000,00	-	PP
24	Putussibau	Sekadau	2.500.000,00	-	PP
25	Putussibau	Sanggau	2.700.000,00	-	PP
26	Putussibau	Landak	3.000.000,00	-	PP
27	Putussibau	Pontianak	3.800.000,00	-	PP
28	Putussibau	Kubu Raya	3.800.000,00	-	PP
29	Putussibau	Mempawah	3.800.000,00	-	PP
30	Putussibau	Singawang	4.000.000,00	-	PP
31	Putussibau	Bengkayang	4.000.000,00	-	PP
32	Putussibau	Sambas	5.000.000,00	-	PP
33	Putussibau	Ketapang	4.000.000,00	-	PP
34	Putussibau	Kayong Utara	4.000.000,00	-	PP



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATRA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATRA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATRA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

B. BIAYA RAPID TEST DAN PCR/SWAB TEST

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	RAPID TEST	OK	150.000,00
2	PCR/SWAB TEST	OK	900.000,00

B. UANG REPRESENTASE PERJALANAN DINAS

NOMOR	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI-8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NOMOR	URAIAN	SATUAN	SETINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I	SETINGKAT ESELON II
1	2	3	4	5
1	FULLBOARD	OH	810.000,00	664.000,00
2	FULLDAY	OH	400.000,00	331.000,00
3	HALFDAY	OH	337.000,00	250.000,00
4	RESIDENCE	OH	737.000,00	581.000,00

D. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	FULLBOARD DI LUAR KOTA	OH	130.000,00
2	FULLBOARD DI DALAM KOTA	OH	130.000,00
3	HALFDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	OH	95.000,00
4	RESIDENCE DI DALAM KOTA	OH	130.000,00

Keterangan :

- OH : Orang/Hari.
- Fullboard : Kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- Fullday : Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- Halfday : Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- Residence : Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **86** TAHUN 2020
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/DALAM DAERAH

NOMOR	URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH	PIMPINAN DPRD/ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ NON ESELON GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ NON ESELON GOLONGAN III, FUNGSIONAL TRAMPIL, FUNGSIONAL AHLI DAN NON PNS BERPENDIDIKAN SARJANA	PNS GOLONGAN I/II, NON PNS BERPENDIDIKAN D3 DAN BERPENDIDIKAN SLTA SEDERAJAT SERTA BERPENDIDIKAN SLTP SEDERAJAT
1	2		4	5	6	7	8
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH - Dalam Kabupaten Kapuas Hulu	OH	500.000	500.000	450.000	400.000	350.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PERJALANAN BIASA/LUAR DAERAH)

NOMOR	URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH	PIMPINAN DPRD/ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ NON ESELON GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ NON ESELON GOLONGAN III, FUNGSIONAL TRAMPIL, FUNGSIONAL AHLI DAN NON PNS BERPENDIDIKAN SARJANA	PNS GOLONGAN I/II, NON PNS BERPENDIDIKAN D3 DAN BERPENDIDIKAN SLTA SEDERAJAT SERTA BERPENDIDIKAN SLTP SEDERAJAT
1	2		4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.999	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000

B

9

1	2	3	4	5	6	7	8
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	B A L I	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :
OH = Orang/Hari.



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

A. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT/ENAM (PP)
(KE KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NOMOR	Berangkat	Tujuan	1.000cc - 1.450cc		1.450cc - 1.750cc		1.750cc - 1.950cc		1.950cc - 2.250cc		2.250cc ke atas	
			Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Putussibau	Sintang	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter
2	Putussibau	Melawi	120 liter	120 liter	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter	160 liter	160 liter
3	Putussibau	Sekadau	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter	160 liter	160 liter	175 liter	175 liter
4	Putussibau	Sanggau	150 liter	150 liter	160 liter	160 liter	175 liter	175 liter	185 liter	185 liter	200 liter	200 liter
5	Putussibau	Landak	160 liter	160 liter	175 liter	175 liter	185 liter	185 liter	200 liter	200 liter	225 liter	225 liter
6	Putussibau	Pontianak	220 liter	220 liter	230 liter	230 liter	250 liter	250 liter	275 liter	275 liter	300 liter	300 liter
7	Putussibau	Kubu Raya	220 liter	220 liter	230 liter	230 liter	250 liter	250 liter	275 liter	275 liter	300 liter	300 liter
8	Putussibau	Mempawah	240 liter	240 liter	250 liter	250 liter	275 liter	275 liter	300 liter	300 liter	325 liter	325 liter
9	Putussibau	Singkawang	265 liter	265 liter	285 liter	285 liter	310 liter	310 liter	325 liter	325 liter	340 liter	340 liter
10	Putussibau	Bengkayang	265 liter	265 liter	285 liter	285 liter	310 liter	310 liter	325 liter	325 liter	340 liter	340 liter
11	Putussibau	Sambas	285 liter	285 liter	310 liter	310 liter	325 liter	325 liter	340 liter	340 liter	360 liter	360 liter
12	Putussibau	Ketapang	300 liter	300 liter	325 liter	325 liter	350 liter	350 liter	375 liter	375 liter	400 liter	400 liter
13	Putussibau	Kayong Utara	325 liter	325 liter	350 liter	350 liter	375 liter	375 liter	400 liter	400 liter	425 liter	425 liter

(DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU)

NOMOR	Berangkat	Tujuan	1.000cc - 1.450cc		>1.450cc - 1.750cc		>1.750cc - 1.950cc		>1.950cc - 2.250cc		>2.250cc ke atas	
			Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Putussibau	Bika	12 liter	12 liter	14 liter	14 liter	16 liter	16 liter	18 liter	18 liter	20 liter	20 liter
2	Putussibau	Kalis	12 liter	12 liter	14 liter	14 liter	16 liter	16 liter	18 liter	18 liter	20 liter	20 liter
3	Putussibau	Mentebah	20 liter	20 liter	25 liter	25 liter	30 liter	30 liter	35 liter	35 liter	40 liter	40 liter
4	Putussibau	Bunut Hulu	40 liter	40 liter	45 liter	45 liter	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter
5	Putussibau	Boyan Tanjung	40 liter	45 liter	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter
6	Putussibau	Pengkadan	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter
7	Putussibau	Hulu Gurung	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter
8	Putussibau	Bunut Hilir	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter	85 liter	85 liter
9	Putussibau	Seberuang	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter	85 liter	85 liter	90 liter	90 liter
10	Putussibau	Semitau	75 liter	75 liter	85 liter	85 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter
11	Putussibau	Suhaid	80 liter	80 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter
12	Putussibau	Jongkong	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter	85 liter	85 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter
13	Putussibau	Selimbau	80 liter	80 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter
14	Putussibau	Silat Hulu	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	125 liter	125 liter
15	Putussibau	Silat Hilir	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	125 liter	125 liter
16	Putussibau	Embaloh Hulu	40 liter	40 liter	45 liter	45 liter	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter
17	Putussibau	Batang Lupar	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter
18	Putussibau	Badau	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	125 liter	125 liter
19	Putussibau	Empanang	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter
20	Putussibau	Puring Kencana	140 liter	140 liter	155 liter	155 liter	170 liter	170 liter	185 liter	185 liter	200 liter	200 liter

A

9

B. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK SPEED BOAT 40 HP, 115 HP DAN 200 HP (PP)

I. SPEED BOAT 40 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin/Minyak Tanah
1	2	3	4
1	Putussibau	Kecamatan Manday	40 liter
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	65 liter
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	150 liter
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	100 liter
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	175 liter
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	250 liter
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	300 liter
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	350 liter
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	375 liter
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	375 liter
11	Putussibau	Sintang	500 liter

II. SPEED BOAT 115 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin
1	2	3	4
1	Putussibau	Kecamatan Manday	50 liter
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	100 liter
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	250 liter
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	200 liter
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	350 liter
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	400 liter
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	450 liter
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	500 liter
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	600 liter
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	550 liter
11	Putussibau	Sintang	650 liter

III. SPEED BOAT 200 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin
1	2	3	4
1	Putussibau	Kecamatan Manday	150 liter
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	250 liter
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	450 liter
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	350 liter
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	550 liter
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	650 liter
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	700 liter
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	800 liter
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	850 liter
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	900 liter
11	Putussibau	Sintang	950 liter



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

M. NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

1.	Pejabat Yang Memberi Tugas	
2.	Nama Pegawai Yang Diperintahkan	a. b. c.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP 34 Th 2014 b. Jabatan	a. b. c. a. b. c.
4.	Untuk Tugas	
5.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.

Dikeluarkan di : PUTUSSIBAU
 Pada tanggal :

Atasan Langsung/Kepala SKPD
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)
 NIP.....



BUPATI KAPUAS HULU,

(Handwritten signature)
 A.M. NASIR

(Handwritten mark)

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 NOMOR :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	a. Nama Pegawai Yang Diperintah b. NIP	a. b.
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP 34 Th 2014 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pengikut 1. 2. 3.	Nama : Umur Hubungan Keluarga/Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : PUTUSSIBAU
 Pada tanggal : _____

Atasan Langsung/Kepala SKPD
 (Pejabat yang berwenang)

(.....)
 NIP.....

Handwritten signature

Handwritten mark

Berangkat dari : Putussibau
(tempat kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :

Atasan Langsung/Kepala SKPD
(Pejabat yang berwenang)

(.....)
NIP.....

Tiba di :
Pada tanggal :

Kepala

Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :
Kepala

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Tiba di :
Pada tanggal :

Kepala

Berangkat dari :
Pada tanggal :
Ke :
Kepala

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Tiba di :
Pada tanggal :
Atasan Langsung/Kepala SKPD
(Pejabat yang berwenang)

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang

(.....)
NIP.....

CATATAN LAIN-LAIN :

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No. B-296/MK/I/4/1974)



A.M. NASIR

A2

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NOMOR	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah :			
Terbilang :			

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan
 perjalanan dinas,

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

Perhitungan SPPD Rampung

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal.....
 Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NOMOR	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran,

(.....)
 NIP

....., tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
 melakukan perjalanan dinas,

(.....)
 NIP



BUPATI KAPUAS HULU,
 A.M. NASIR

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

KOP SURAT

LAPORAN PERJALANAN DINAS

(diisi : NAMA KEGIATAN PERJALANAN DINAS YANG DILAKSANAKAN)

I. PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum / dasar penugasan

(diisi dengan Surat Perintah Tugas pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas)

B. Maksud dan Tujuan

(diisi dengan maksud dan tujuan dilakukannya perjalanan dinas)

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan nama kegiatan perjalanan yang akan dilaksanakan, dicantumkan dasar surat panggilan atau informasi lain yang ada)

III. HASIL YANG DICAPAI

(diisi dengan Hasil yang diperoleh dari perjalanan tersebut)

IV. PENUTUP

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang melaksanakan Tugas :

Nama	Pangkat	NIP	Tanda Tangan



BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

(Handwritten mark)